

Gandeng Perusahaan Jalankan Program MBG, Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Besar ke Perekonomian Kaltim

BALIKPAPAN – Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus dimulai dari hulunya. Yakni jumlah APBN 2025 yang telah ditetapkan. Di mana berdasarkan postur, terdapat pendapatan negara mencapai Rp3.005,1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Kemudian ada pembiayaan anggaran senilai Rp616,2 triliun.

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi menjelaskan, efisiensi anggaran yang menjadi hangat saat ini bersumber dari tipisnya pendapatan negara. Tidak sebanding dengan belanja negara. Sehingga pemerintah berupaya melakukan pemangkasan terhadap sektor-sektor yang dianggap tidak prioritas. Utamanya yang bersifat diskresioner demi bisa menjalankan program prioritas yang memakan banyak biaya.

“Dalam batang tubuh APBN ada komponen yang bersifat non-diskresioner dan diskresioner *spending*. Yang non-diskresioner itu mencakup 60 persen. Itu tidak bisa diutak-atik. Karena sudah dilindungi undang-undang. Menjadi *mandatory spending*. Misalnya untuk membayar gaji pegawai. Nah yang diskresioner itu yang digunakan untuk membiayai Program Prioritas Presiden, utamanya MBG (Makan Bergizi Gratis),” jelas Aji.

Sementara efeknya di Kaltim, Aji menyebut tidak akan terlalu berdampak besar. Karena disebutkan, Kaltim secara keuangan cukup stabil ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun berbeda dengan kabupaten/kota di bawahnya. Karena masih ada yang bergantung dari dana transfer pusat ke daerah.

“Kalau Kaltim aman. Di kabupaten/kota ini yang riskan. Karena ada yang masih secara postur APBD-nya banyak didominasi oleh pendapatan transfer pusat. Kutim misalnya,” ucap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu. Diketahui, APBD 2025 Kutim sebesar Rp11,151 triliun. Terdiri dari PAD Rp358,388 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi mencapai Rp10,245 triliun. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp547,795 miliar.

“Ketimpangan ini membuat daerah-daerah yang bergantung pada dana transfer lebih akan terdampak efisiensi,” ucap Aji. Yang disayangkannya, kondisi itu akhirnya membuat sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dan instansi terdampak pemangkasan melakukan blunder. Di mana banyak berita yang menyebut

terjadi pemangkasan terhadap pegawai khususnya kontrak atau honorer, hingga dilakukannya pengurangan gaji.

Padahal secara instruksi, efisiensi tidak berlaku untuk kegiatan yang mengganggu esensi kehidupan masyarakat luas. “Ada beberapa daerah yang merumahkan pegawai honor mereka. Termasuk yang kru stasiun TV pemerintah itu. Tapi akhirnya dibatalkan setelah *hearing* di DPR. Efisiensi juga tidak berlaku bagi sektor yang sudah menjadi amanat UU (Undang-Undang), seperti sektor pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.

Aji meneruskan, efisiensi yang sudah diukur hanya untuk memangkas anggaran yang tidak berdampak kepada masyarakat luas. Seperti perjalanan dinas, rapat kerja, hingga pengadaan ATK. Meski lanjutnya, itu juga punya dampak luas kepada ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti sektor transportasi, makan dan minum, pariwisata hingga perhotelan.

“Tetapi untuk Kaltim secara makro tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi terganggu. Turun iya, namun sedikit. Misal ekonomi Kaltim saat ini ada di angka 6,17 persen, maka paling akan turun di angka 6 atau 5,9 persen. Tidak akan sampai setengahnya. Karena memang penopang utama ekonomi Kaltim bukan dari sektor-sektor yang bakal terimbas efisiensi,” ucapnya.

Adapun persoalan utama hingga terjadinya efisiensi, yakni program MBG, dirinya mendorong pemerintah menggandeng sektor swasta. Melalui dana *corporate social responsibility* (CSR) mereka, sebenarnya banyak perusahaan terutama di Kaltim dengan kapitalisasi besar mampu membantu program tersebut. Misalnya, membebaskan 25 persen anggaran MBG kepada swasta.

“Itu akan mengurangi beban APBN. Pasti akan membuat anggaran yang dipangkas menjadi lebih sedikit. Karena swasta seharusnya punya peran juga membangun bangsa ini dan ikut menyelesaikan program pemerintah,” ucapnya.

TUNGGU KELANJUTAN INPRES

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih menunggu kelanjutan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.

Kepala BPKAD Samarinda, Ibrohim, menyatakan pemerintah daerah harus mengikuti setiap arahan dari pusat. Bahwa hierarkinya pemerintah daerah, ikut apa yang dikatakan pusat, apapun yang terjadi. "Pak Wali Kota sudah diinstruksikan untuk mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang mencakup beberapa poin efisiensi," ujarnya, Minggu (16/2).

Ibrohim menjelaskan, efisiensi yang dimaksud mencakup perjalanan dinas, sarasehan, diskusi/*focus group discussion* (FGD), alat tulis kantor (ATK), dan pemangkasan honorarium non-pegawai. BPKAD sedang melakukan pemetaan anggaran berdasarkan Inpres tersebut. Pos anggaran yang mungkin terpotong akan diidentifikasi. "APBD yang sudah teragendakan akan terpotong karena adanya efisiensi ini," jelasnya.

Dia menambahkan, dampak dari efisiensi itu diperkirakan akan memengaruhi pendapatan daerah, termasuk pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk pemeliharaan fisik.

Nanti, setelah ada kejelasan lebih lanjut, rapat dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan dilakukan untuk penjelasan lebih spesifik mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. "Kami berharap arahan lebih lanjut dari kementerian segera tiba," ungkap Ibrohim.

Diketahui Presiden Prabowo menerbitkan Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam Inpres itu mengarahkan efisiensi belanja negara dalam APBN dan APBD 2025. Dokumen itu ditandatangani pada 22 Januari 2025. **(rdh/rd)**

Sumber Berita :

1. www.kaltimpost.co.id, Gandeng Perusahaan Jalankan Program MBG, Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Besar ke Perekonomian Kaltim, 17/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

